



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



TRIWULAN II
2019

Penyusun :

Penanggung Jawab : Midden Sihombing | Ketua Tim : Mustriyono |
Tim Penyusun : Sri Kuncoro Herlambang | Moch. Ichsan Arditriansyah
| Maharrucha Zakka | Fahmi Mustafa

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Kalimantan Utara

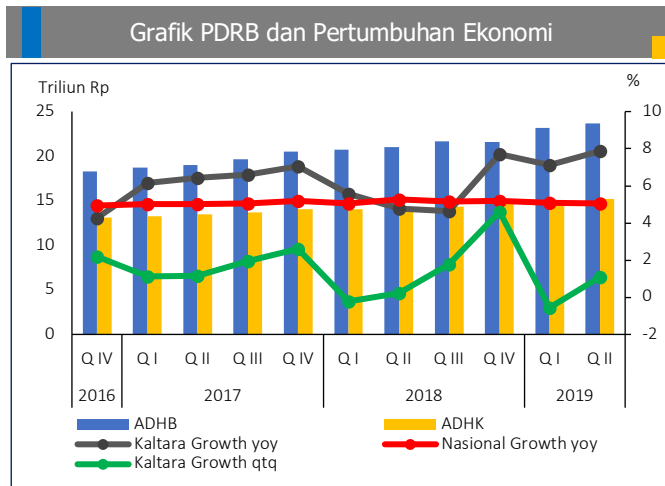
DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	3
C. Indikator Kesejahteraan	4
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	6
A. Pendapatan Negara.....	6
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	13
A. Pendapatan Daerah.....	14
B. Belanja Daerah	19
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun	20
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD).....	21
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	21
B. Pendapatan Konsolidasian.....	21
C. Belanja Konsolidasian	23
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	24
V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH	25



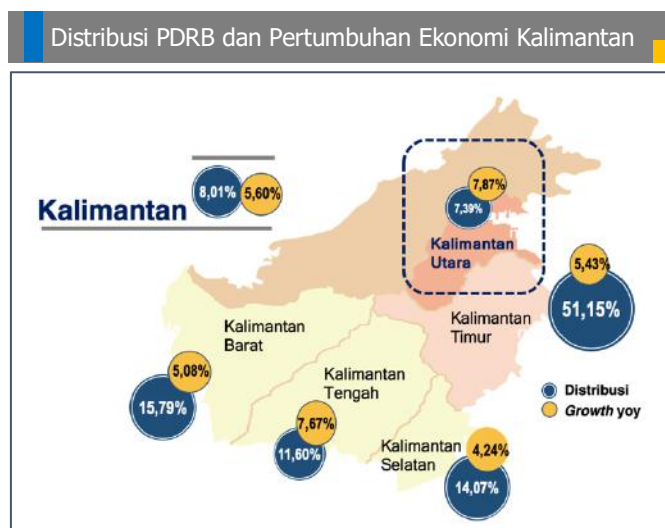
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Indonesia. Bila dibandingkan dengan periode triwulan I 2018 (qtq) kinerja perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan II juga tercatat tumbuh positif sebesar 1,09%. Tingkat pertumbuhan (yoy) yang tercatat pada periode pelaporan menghasilkan angka Nominal PDRB berdasarkan ADHB kembali meningkat menjadi sebesar Rp23,66 triliun dan berdasarkan ADHK tercatat sebesar sebesar Rp15,23 triliun.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

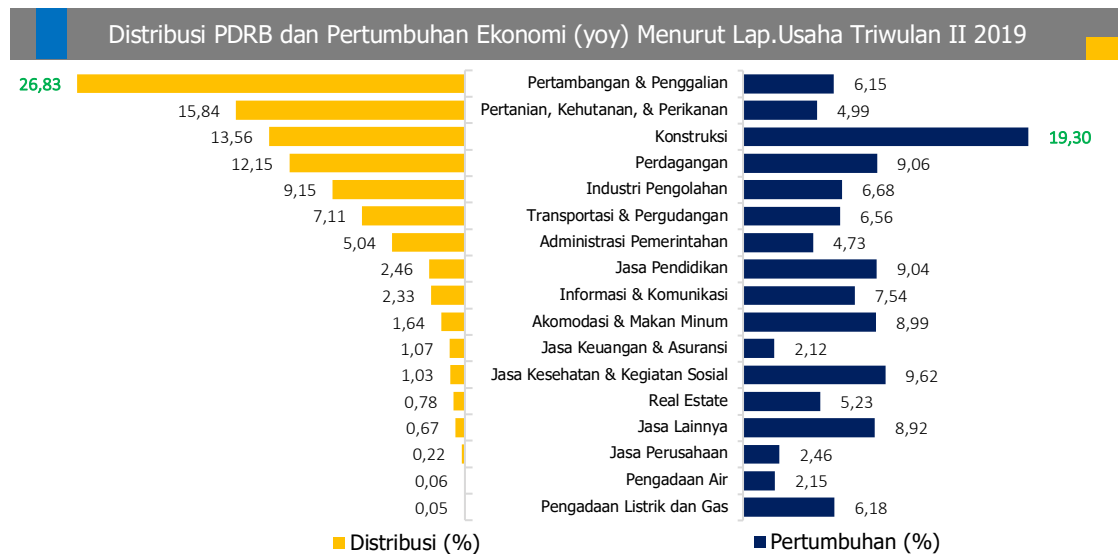
Utara pada triwulan II 2019 tidak mengalami perubahan dari periode-periode sebelumnya, dimana lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih menjadi penggerak utama perekonomian dengan andil sebesar 26,83 persen terhadap total

Raihan positif kembali diukur provinsi termuda di Indonesia ini melalui catatan tingkat pertumbuhan ekonomi Pada triwulan II 2019 yang mencapai 7,87% (yoy). Tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara berhasil melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi yang tertinggi se-

Secara spasial di Pulau Kalimantan, tingkat pertumbuhan ekonomi (yoy) Kalimantan Utara kembali menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya. Adapun kontribusinya terhadap perekonomian di regional Kalimantan provinsi termuda ini masih menjadi yang terkecil sebesar 7,87%.

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi regional Kalimantan

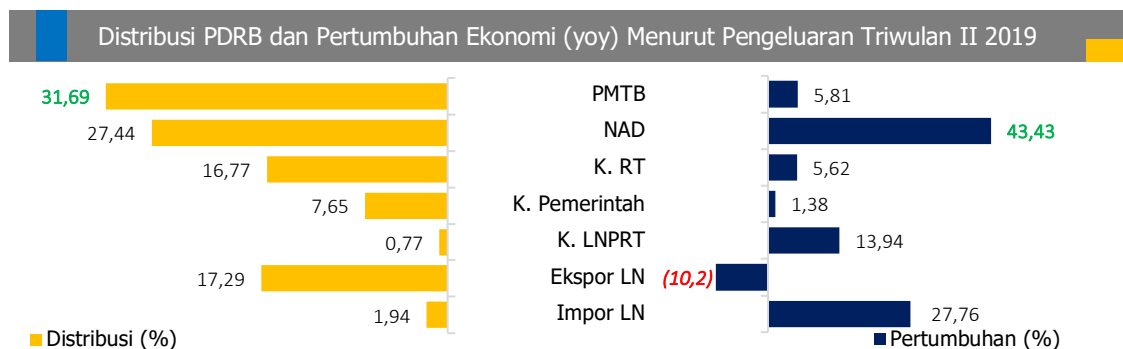
PDRB. Ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, semua sektor mengalami pertumbuhan, dimana lapangan usaha konstruksi mencatatkan tingkat pertumbuhan yang tertinggi



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

sebesar 19,30%, diikuti oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,62% serta lapangan usaha perdagangan sebesar 9,06%.

Seiring dengan berlanjutnya realisasi proyek-proyek strategis di Kalimantan Utara, peranan lapangan usaha konstruksi semakin meningkat terhadap perekonomian sebagaimana terlihat pada laju pertumbuhan serta andil yang paling dominan sebesar 2,18% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada periode pelaporan. Proyek-proyek strategis tersebut antara lain proyek gedung Rumah Sakit Pertamina di Tarakan, Pabrik CPO di Malinau dan Nunukan serta proyek pembangunan infrastruktur jalan yang biayai dari APBN.

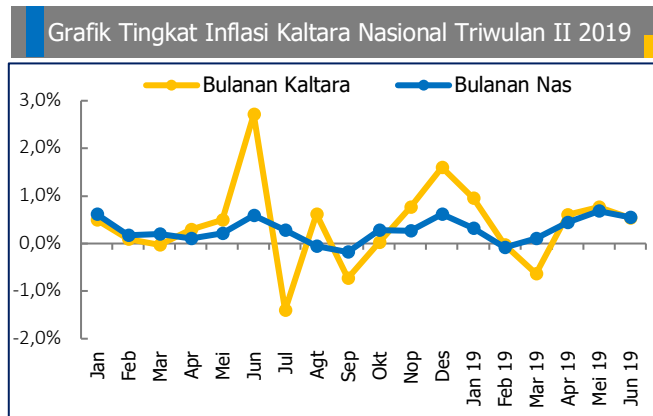


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Jika dilihat menurut pengeluarannya, seluruh komponen PDRB Kalimantan Utara kecuali Ekspor Luar Negeri pada periode triwulan II 2019 tercatat mengalami pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun sumber

pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2019 berasal dari kinerja Net Ekspor Antar Daerah dengan andil sebesar 8,31% diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 1,61% terhadap angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.

B. Inflasi



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Setelah mengalami tren penurunan sepanjang triwulan sebelumnya, tingkat inflasi Kalimantan Utara pada triwulan II 2019 mengalami kenaikan di bulan April dan Mei kemudian turun pada bulan Juni. Pada bulan April, inflasi yang terjadi di Kalimantan Utara tercatat

sebesar 0,60% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,29%. Tingkat inflasi yang tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada kelompok bahan makanan sebesar 1,88%, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,75% serta kelompok kesehatan 0,21%. Adapun komoditas utama yang memiliki andil dominan menyebabkan inflasi secara berturut-turut adalah Bawang Merah, Bawang Putih, Angkutan Udara, Cabe Rawit, dan Ketimun

Pada bulan Mei 2019 di Kalimantan Utara, perubahan Indeks Harga Konsumen kembali mengalami kenaikan atau menyebabkan inflasi sebesar 0,77%. Kenaikan IHK tersebut terjadi diseluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dimana andil kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi merupakan yang paling dominan terhadap inflasi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 0,33% dan 0,30%. Komoditas yang paling dominan memberikan andil inflasi pada bulan mei 2019 adalah angkutan udara yang mencapai 0,43%, hal ini tentunya merupakan dampak musiman Ramadhan dan Idul Fitri dimana permintaan terhadap angkutan udara mengalami peningkatan.

Memasuki akhir triwulan, terjadi inflasi sebesar 0,55% pada bulan Juni di Kalimantan Utara. Inflasi Juni tercatat lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 2,71%. Hal ini dikarenakan, bulan Juni pada tahun 2019 sudah memasuki akhir momen Ramadhan dan Idul Fitri sehingga tingkat permintaan atas bahan makanan dan Transportasi udara mengalami penurunan. Meskipun kelompok bahan makanan dan

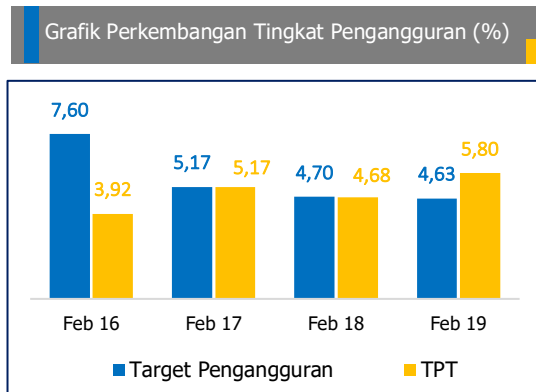
kelompok transportasi masih memberikan andil terbesar terhadap inflasi juni 2019, namun tingkat inflasinya pada Juni 2019 tercatat jauh lebih rendah dibandingkan periode Juni 2018

Tingkat Inflasi tahun kalender Kalimantan Utara sampai dengan periode pelaporan tercatat sebesar 2,21% sementara Inflasi tahun ke tahun tercatat 3,10%. Tingkat inflasi Kalimantan Utara yang tercatat hingga Juni 2019 masih berada dibawah target inflasi tahun 2019 yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,33 persen.

Andil Inflasi Per Kelompok Pengeluaran Triwulan II 2019 (%)							
Kelompok Pengeluaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Thn Kalender
Bahan Makanan	0,59	-0,63	-0,24	0,49	0,33	0,37	3,46
Makanan & Minuman, Rokok & Tembakau	0,13	0,009	0,03	-0,002	0,04	0,005	1,27
Perumahan, Air, Listrik, Gas & BB	-0,07	-0,03	0,02	-0,012	0,05	-0,008	-0,18
Sandang	0,009	0,003	0,003	-0,003	0,001	0,01	0,51
Kesehatan	0,02	0,002	0,01	0,010	0,03	0,001	1,79
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	0,003	0,000	0,000	0,00	0,00	0,01	0,30
Transportasi & Komunikasi	0,27	0,61	-0,45	0,10	0,30	0,12	7,11
Inflasi (mtm)	0,96	-0,03	-0,62	0,59	0,76	0,53	2,21

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

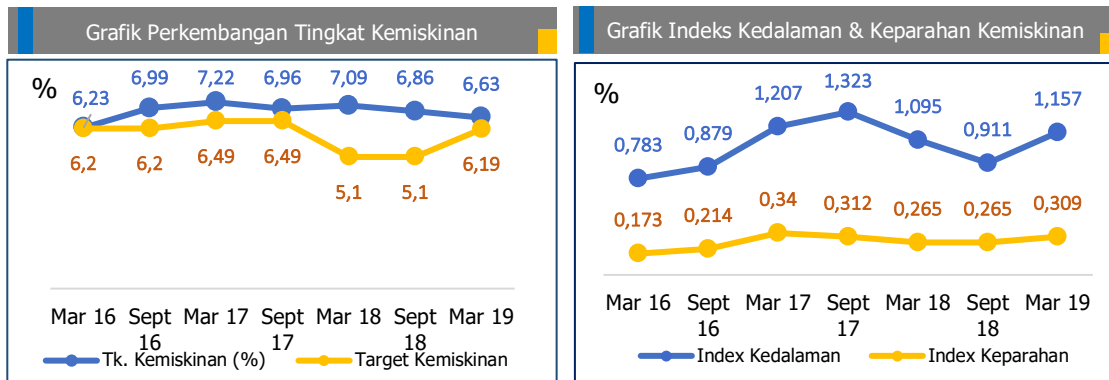
C. Indikator Kesejahteraan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional Kaltara pada bulan Februari 2019 tercatat sebesar 5,80% atau sekitar 20.681 dari 356.282 orang angkatan kerja. Angka TPT ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan periode Februari 2018 yang tercatat sebesar 4,68% dan telah melampaui target pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan dalam

Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 sebesar 4,63%. Dibandingkan dengan TPT Nasional yang mencapai 5,13%, TPT Kaltara periode ini tercatat lebih baik.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Selain dari sisi ketenagakerjaan, indikator pembangunan di wilayah Kalimantan Utara yang tercermin dari Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 6,86% pada September 2018 menjadi 6,63% pada Maret 2019. Jika ditelusuri lebih mendalam, tingkat kemiskinan yang menurun dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang turun meskipun disaat yang sama penduduk miskin perkotaan justru bertambah. Karena sebagaimana diketahui jumlah penduduk miskin sebagian besar masih berada di desa, sehingga naik turunnya jumlah penduduk miskin di pedesaan sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan keseluruhan. Meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kondisi penduduk Kalimantan Utara yang masih berada dibawah Garis Kemiskinan justru semakin jauh dari Garis Kemiskinan ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan. Selain itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2019 yang juga menunjukkan kenaikan dibanding periode sebelumnya menggambarkan ketimpangan diantara penduduk miskin juga semakin melebar. Garis Kemiskinan pada periode Maret 2019 menunjukkan kenaikan dibanding periode sebelumnya, dimana Garis Kemiskinan Makanan memberi andil terbesar. Fenomena ini justru menunjukkan kebalikan dari perubahan indeks harga konsumen dibulan Maret 2019 yang mengalami penurunan sehingga memicu terjadinya deflasi.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Triwulan II 2018 -2019 (Miliar Rp)

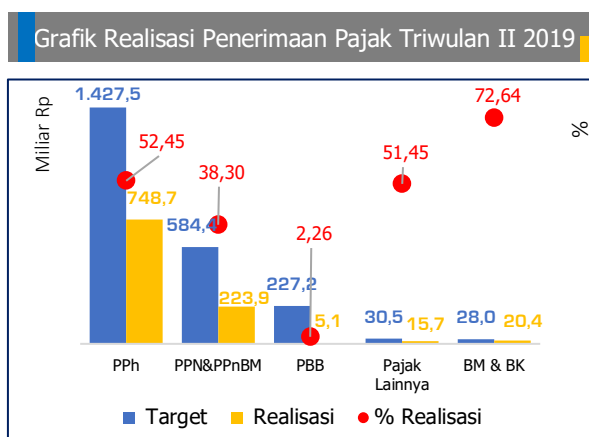
URAIAN	T.A. 2018			T.A. 2019		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
A. Pendapatan dan Hibah	2,652.0	617.3	23.3%	2,502.7	1,111.5	44.4%
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,652.0	617.3	23.3%	2,502.7	1,111.5	44.4%
1. Penerimaan Perpajakan	2,490.2	538.1	21.6%	2,356.7	1,017.0	43.2%
a. Pajak Dalam Negeri	2,474.1	524.4	21.2%	2,328.7	996.6	42.8%
b. Pajak Perdagangan Int.	16.1	13.7	85.1%	28.0	20.4	72.8%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	161.8	79.2	48.9%	146.0	94.5	64.7%
a. PNBP Lainnya	121.3	67.3	55.4%	99.3	81.4	82.0%
b. Pendapatan BLU	40.5	11.9	29.4%	46.7	13.0	27.9%
B. Belanja Negara	9,728.2	4,146.8	42.6%	11,035.7	4,554.6	41.3%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,388.5	983.6	29.0%	4,183.0	1,198.1	28.6%
1. Belanja Pegawai	600.0	284.7	47.5%	801.0	340.5	42.5%
2. Belanja Barang	1,072.8	311.7	29.1%	1,283.7	455.6	35.5%
3. Belanja Modal	1,709.4	387.2	22.7%	2,093.3	401.8	19.2%
4. Bantuan Sosial	6.3	-	0.0%	5.0	0.1	1.5%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	6,339.8	3,163.2	49.9%	6,852.7	3,356.5	49.0%
1. Transfer ke Daerah	5,957.4	3,030.8	50.9%	6,389.5	3,079.0	48.2%
a. Dana Bagi Hasil	1,127.4	392.8	34.8%	1,405.6	538.9	38.3%
i. Dana Bagi Hasil Pajak	387.2	121.5	31.4%	413.6	121.2	29.3%
ii. Dana Bagi Hasil SDA	740.2	271.3	36.7%	992.0	417.7	42.1%
b. Dana Alokasi Umum	3,709.6	2,164.0	58.3%	3,857.3	2,249.0	58.3%
c. DAK Fisik	656.2	235.8	35.9%	665.3	83.4	12.5%
d. Dana Insentif Daerah	69.5	34.8	50.1%	-	-	-
f. DAK Non Fisik	394.7	203.4	51.5%	461.3	207.7	45.0%
2. Dana Desa	387.6	232.5	60.0%	463.3	277.5	59.9%
D. Surplus/Defisit Anggaran	(7,076)	(3,530)	49.9%	(8,533)	(3,443)	40.4%

Sumber : Kanwil DJP Kaltim, Kanwil DJBC Kalbagtim, OM SPAN dan SIMTRADA, diolah.

Kinerja realisasi pendapatan mengalami perbaikan dibandingkan tahun yang lalu, sedangkan realisasi belanja pemerintah belum ideal.

A. Pendapatan Negara

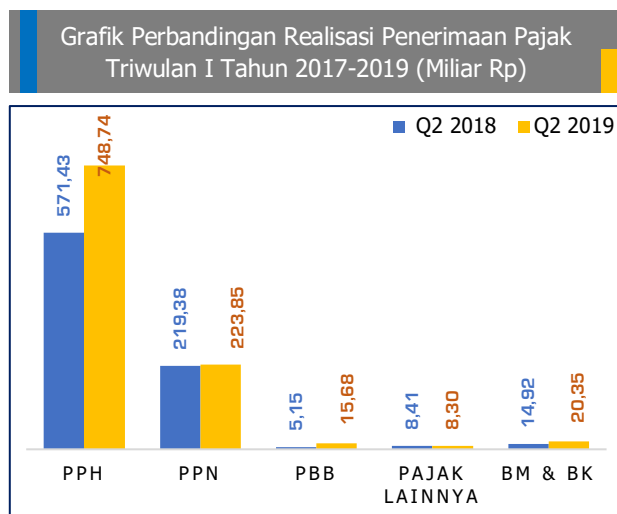
1. Penerimaan Perpajakan



Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara & Kanwil DJBC

Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi penerimaan pajak di regional Kalimantan Utara tercatat Rp1.061,9 miliar, terjadi peningkatan dibandingkan penerimaan di periode yang sama tahun 2017 yang hanya mencapai Rp809,5 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, capaian penerimaan perpajakan pada periode ini juga mengalami peningkatan secara persentase terhadap target, dimana capaian

pada triwulan II tahun 2018 yang tercatat sebesar 21,6 persen meningkat menjadi 43,2 persen pada triwulan II tahun 2019. Walaupun target di tahun 2018 lebih tinggi dari tahun ini tapi secara nominal mengalami kenaikan yang signifikan sampai di akhir tahun anggaran 2019. PPh dan PPN masih menjadi kontributor utama realisasi penerimaan pajak. Sampai dengan akhir periode laporan, penerimaan PPh mencapai 52,5persen dari target atau setara Rp748,7,4 miliar. Realisasi PPN mencapai 38,3persen atau sebesar Rp223,9 miliar. Persentase realisasi penerimaan pajak tertinggi tercatat pada jenis Pajak Perdagangan Internasional yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar yang berhasil tercapai sebesar 72,6 persen dari target.



Sumber : Kanwil DJP Kaltimlara & Kanwil DJBC Kalbagtim

Jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun 2018, maka secara umum capaian pada tahun 2019 menunjukkan sinyal yang sangat menggembirakan karena terjadi peningkatan hampir di beberapa jenis pajak mengalami peningkatan, PPh yang menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar. Di tahun 2019 hanya

Pajak Lainnya mengalami penurunan.

Perhitungan total pajak tidak sama dengan yang disajikan dalam total pajak dalam negeri, karena dalam penyajian pajak perdaerah, perjenis pajak KPP sebagai penyedia hanya mencatat pajak yang berada dalam wilayah kerja KPP tersebut, tetapi angka yang tersaji dalam Pajak dalam Negeri merupakan total dari seluruh penerimaan pajak yang disetorkan di regional Kalimantan Utara.

a) Pajak Penghasilan

Realisasi penerimaan PPh pada triwulan II tahun 2019 tercatat Rp748,74 miliar (*I account* triwulan II 2019), naik cukup signifikan sebesar Rp177,3 miliar dari realisasi triwulan I tahun 2019 yang hanya sebesar Rp571,43 miliar. Peningkatan ini terlihat di setiap daerah, dimana kontributor terbesar PPh adalah Kota Tarakan sebesar Rp272,9 miliar, Kabupaten Nunukan sebesar Rp103,3 miliar, dan Kabupaten Bulungan sebesar Rp88,7,9 miliar. Capaian realisasi yang berasal dari ketiga Kabupaten/Kota ini menyumbang Rp465,01 miliar atau hampir 89,51% dari total realisasi PPh.

b) Pajak Pertambahan Nilai

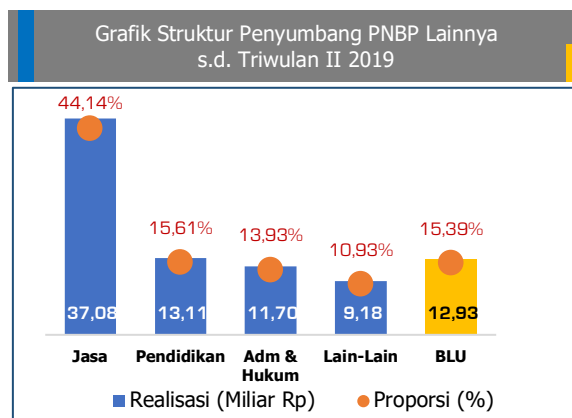
Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada triwulan II tahun 2019 mencapai Rp223,85 miliar, mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar Rp4,47 miliar atau sebesar 2,45% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan merupakan 2 wilayah yang menjadi kontributor terbesar besaran di triwulan II 2019 ini masing-masing sebesar Rp119,99 miliar dan Rp50,95 miliar.

Realisasi yang tercatat sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 berdasarkan data Kanwil DJP Kaltimara, termasuk di dalamnya realisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp165,03 juta.

c) Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada triwulan II tahun 2019 tercatat sebesar Rp20,35 miliar atau 72,64% dari target tahun 2019. Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp15,54 miliar dan Bea Keluar senilai Rp4,81 miliar. Capaian realisasi ini baik secara nominal maupun persentase realisasi terhadap target mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Adapun keseluruhan pendapatan tersebut berasal kegiatan ekspor dan impor barang di Kota Tarakan dan Kab. Nunukan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Sumber : OMSPAN, diunduh 5 Agustus 2018

Realisasi PNBP di triwulan I tahun 2019 mencapai Rp49,85 miliar, meningkat 14,57% atau sebesar Rp6,33 miliar dari realisasi PNBP periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp43,52 miliar. PNBP yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu PNBP Lainnya dan PNBP Badan Layanan

Umum. Sedangkan jenis PNBP Sumber Daya Alam dan PNBP Laba BUMN seluruhnya disetorkan dan tercatat secara terpusat.

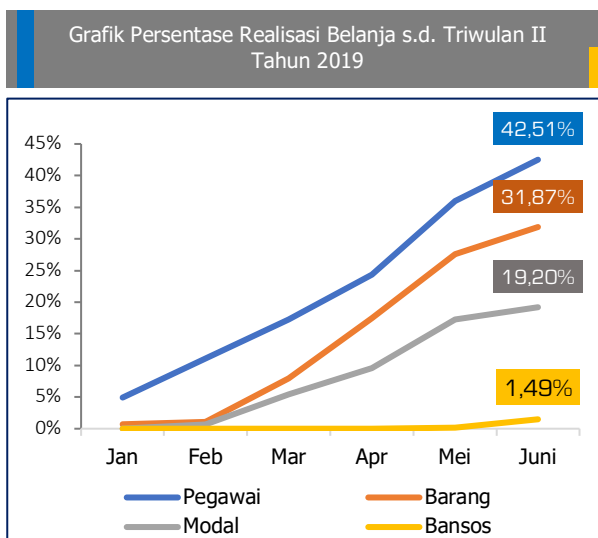
Mayoritas PNBP Lainnya bersumber dari Pendapatan Jasa yang sampai dengan 30 Juni 2019 dapat terealisasi senilai Rp37,08 miliar mencatatkan kontribusi sebesar 44,14% dari total realisasi PNBP. PNBP lain-lain sebesar 10,43 miliar

merupakan gabungan dari pendapatan bunga, penjualan BMN, denda, kesehatan dan lain-lain.

Selain itu, pada triwulan II tahun 2019, sudah terdapat pengesahan transaksi BLU yang ditandai dengan adanya realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum pada Bandar Udara Juwata senilai Rp12,93 miliar.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat



Sumber : Data Realisasi Belanja per wilayah, OM SPAN

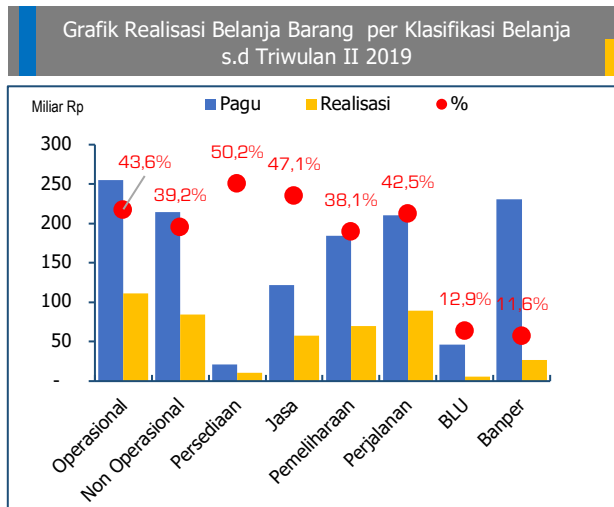
Realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2019 secara keseluruhan masih berada pada level 28,6%. Kinerja realisasi belanja tercatat hampir sama dengan periode yang sama di tahun 2018 kecuali pada jenis belanja pegawai dan belanja modal sedikit mengalami penurunan. Sampai dengan 30 Juni 2019, belanja pegawai yang sudah direalisasikan mencapai 42,51% dari pagu. Tingginya

realisasi belanja pegawai tersebut sesuai dengan karakter belanja pegawai yang relatif konstan setiap bulannya serta relatif tidak memerlukan proses administrasi pencairan yang rumit.

Posisi kedua tercatat pada belanja barang yang sampai dengan akhir periode pelaporan mencapai 35,5%. Capaian ini juga relatif dipengaruhi oleh karakter pencairan belanja barang khususnya untuk membiayai kebutuhan operasional kantor sejak awal tahun anggaran.

Adapun belanja modal mencatatkan realisasi yang kurang menggembirakan, yaitu hanya sebesar 19,2% secara persentase turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 22,7%. Tetapi secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2018, hal ini dikarenakan pagu Belanja Modal mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp1,7 triliun di 2018 menjadi Rp2,1 triliun pada tahun ini. Dan diharapkan pada akhir tahun anggaran capaian persentase dapat melebihi tahun lalu yang tercatat sebesar 89,2%.

a) Belanja Barang



Sumber : Diolah dari data Monev PA

Pagu terbesar belanja barang diperuntukkan untuk belanja operasional yang mencapai Rp255,3 miliar, dengan angka realisasi sebesar Rp111,32 miliar atau 43,60% dari pagu. Belanja barang dengan alokasi paling kecil adalah belanja barang Persediaan yang hanya sebesar Rp21,2 miliar.

Belanja perjalanan dinas yang

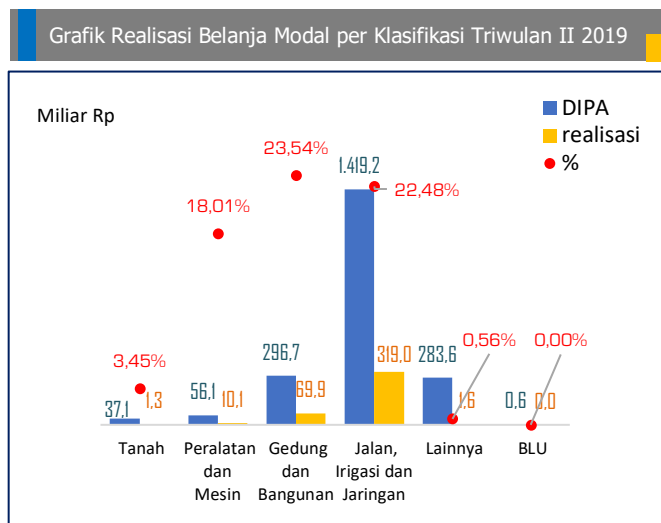
dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas ASN tercatat sebesar Rp210,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan alokasi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Bantuan Pemerintah.

b) Belanja Bantuan Pemerintah

Dana bantuan pemerintah yang dialokasikan pada tahun 2019 ini disalurkan melalui 12 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp107,9 miliar. Alokasi terbesar berasal dari Satker lingkup Kementerian PU-Pera yang mencapai Rp77,7 miliar, disusul kemudian satker lingkup Kementerian Pertanian sebesar Rp19,0 miliar dan satker lingkup Kementerian Desa PDTT sebesar Rp7,4 miliar. Hingga akhir triwulan II tahun 2019, realisasi belanja bantuan pemerintah baru mencapai Rp26,60 miliar atau sebesar 11,55% dari pagu

c) Belanja Modal

Belanja modal terbesar dialokasikan untuk keperluan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp1,41 triliun atau 79,43% dari total belanja modal. Sampai dengan akhir periode laporan, realisasi belanja ini mencapai Rp401,85 miliar atau 19,20% dari pagu. Alokasi dana yang sangat besar tersebut sebagian besar atau mencapai 67,80% merupakan program penyelenggaraan pembangunan jalan khususnya di wilayah perbatasan yang dilaksanakan oleh satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Utara dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara.

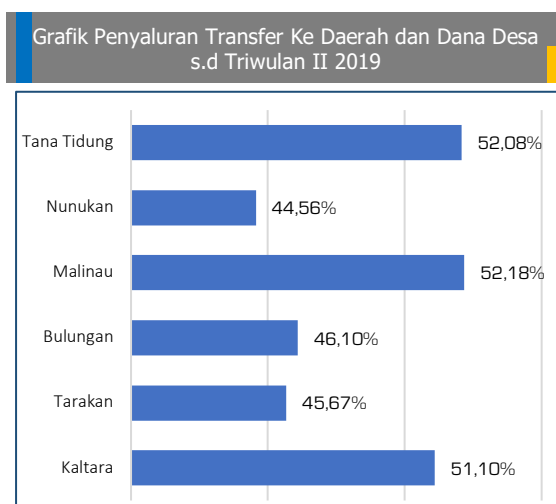


Sumber : Monev PA (olah data) diunduh tanggal 5 Agustus 2019

Alokasi belanja modal terbesar kedua adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencapai Rp296,72 miliar, Sampai dengan akhir triwulan II 2019 realisasi belanja ini baru sebesar Rp69,85 miliar atau 23,54% dari pagu. Realisasi ini masih tergolong rendah dikarenakan sampai dengan triwulan II ini sebagian besar

pekerjaan-pekerjaan fisik dan bersifat kontraktual masih dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Alokasi untuk Gedung dan Bangunan diprioritaskan sebagai penunjang dalam rangka peningkatan penyelenggaraan layanan publik oleh kantor-kantor Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga yang berada di Provinsi Kaltara.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

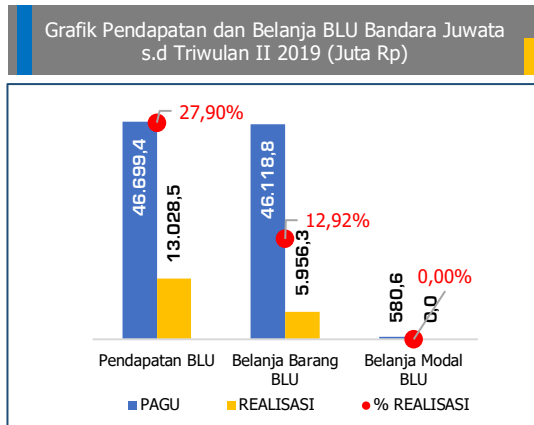


Sumber : Aplikasi SIMTRADA DJPK dan OM SPAN, diunduh 5 Agustus 2019

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 secara rata-rata realisasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai 49,03%. Realisasi tertinggi tercatat ke Kab. Malinau sebesar 52,18% sedangkan realisasi terendah berada di Kota Tarakan sebesar 45,67%.

3. Pengelolaan BLU

Sampai akhir triwulan II tahun 2019, Bandara Udara Juwata Tarakan masih menjadi satu-satunya satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Kalimantan Utara.



Sumber : Aplikasi E-Rekon LK dan Monev PA, diunduh 5 Agustus 2019

Berdasarkan pengesahan pendapatan dan belanja sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019, realisasi pendapatan BLU tercatat sebesar 27,92% dari target atau senilai Rp13,04 miliar. Mayoritas dari realisasi tersebut bersumber dari realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Jasa Bandar Udara yang mencapai Rp3,24 miliar sedangkan sisanya merupakan

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Kepelabuhanan dan Kenavigasian. Sedangkan untuk belanja BLU baru mengesahkan sebesar Rp1,15 miliar atau sebesar 2,5% dari pagu belanja.

C. Prognosis Realisasi APBN

Penetapan kebijakan pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian dan Lembaga melalui instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diharapkan dapat menjadi stimulan bagi setiap Pengguna Anggaran untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran secara lebih tepat, akurat dan akuntabel.

Disamping melakukan pemantauan terhadap capaian IKPA satuan kerja, beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan agar diperoleh prognosis yang relatif mendekati kenyataan, antara lain :

- 1) Data historis/statistik capaian realisasi dan tren penerimaan.
- 2) Instruksi langkah-langkah strategis pelaksanaan APBN 2019.
- 3) Perkiraan realisasi belanja berdasarkan data ADK kontrak yang telah diterima KPPN.
- 4) Data kontrak / rencana kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan ke KPPN.
- 5) Potensi kenaikan/penurunan alokasi dana Transfer ke Daerah apabila pemerintah menetapkan kebijakan APBN-P sebagai dampak penyesuaian indikator-indikator atas asumsi makro yang tidak sesuai perkiraan sampai dengan triwulan II 2019.

Tabel Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2019

URAIAN	PAGU (Miliar Rp)	Realisasi s.d. Triwulan I 2019		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2019	
		Rp (Miliar Rp)	% Real thd PAGU	Rp (Miliar Rp)	% Real thd PAGU
Pendapatan Negara	2,502.7	1,111.5	44,47%	2.125,83	84%
Belanja Negara	11,035.7	4,554.6	41,35%	9.950,66	94%
Surplus/Defisit	(8.533,05)	(3.443,14)		(7.824,82)	

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Hingga akhir Triwulan II 2019 pendapatan daerah yang terealisasi secara agregat mencapai Rp3,7 triliun atau 45,5% dari target. Tingkat realisasi pada periode ini, secara persentase mengalami penurunan dari periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar 46,4%.

Pada periode yang sama, alokasi belanja dan transfer seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara terealisasi sebesar Rp2,3 triliun atau 27,7% dari pagu. Capaian ini lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terealisasi 30,1%.

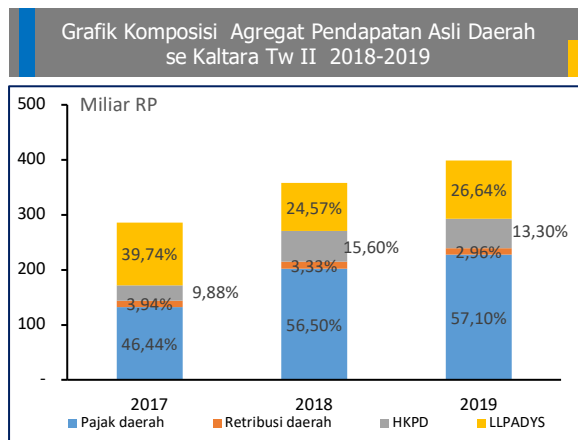
Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II 2018-2019 (Miliar Rp)

URAIAN	T.A. 2018			T.A. 2019			%↑↓ Nominal Realisasi
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
PENDAPATAN	7.559,3	3.510,4	46,4%	8.213,9	3.739,3	45,5%	6,5%
PAD	848,8	358,4	42,2%	964,3	399,2	41,4%	11,4%
Pajak daerah	433,8	202,5	46,7%	506,7	228,0	45,0%	12,6%
Retribusi daerah	48,3	11,9	24,7%	52,3	11,8	22,6%	-1,0%
Hasil Pengelolaan KD yang dipisahkan	48,7	55,9	114,9%	59,2	53,1	89,7%	-5,0%
Lain-lain PAD yang sah	318,1	88,1	27,7%	346,2	106,3	30,7%	20,8%
Pendapatan Transfer	6.643,2	3.133,1	47,2%	7.111,0	3.326,6	46,8%	6,2%
Transfer Pemerintah Pusat	6.386,4	3.075,1	48,2%	6.906,9	3.231,5	46,8%	5,1%
Dana Bagi Hasil Pajak	452,6	121,5	26,8%	621,3	121,2	19,5%	-0,2%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	774,9	266,9	34,4%	825,0	417,7	50,6%	56,5%
Dana Alokasi Umum	3.709,6	2.121,6	57,2%	3.857,3	2.148,5	55,7%	1,3%
Dana Alokasi Khusus	992,2	297,8	30,0%	1.062,2	248,7	23,4%	-16,5%
Dana Insentif Daerah	69,5	34,8	50,0%	309,8	157,0	50,7%	351,9%
Dana Desa	387,6	232,5	60,0%	231,2	138,2	59,8%	-40,5%
Transfer Pemerintah Provinsi	169,0	58,0	34,3%	189,5	95,2	50,2%	64,1%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169,0	56,9	33,7%	189,5	95,2	50,2%	67,3%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	1,1		-	-		-100,0%
Transfer Bantuan Keuangan	87,8	-	0,0%	14,5	-	0,0%	#DIV/0!
Lain-lain Pendapatan yang sah	67,3	18,9	28,0%	138,7	13,5	9,7%	-28,5%
Pendapatan Hibah	5,5	0,6	10,2%	61,9	13,5	21,8%	2298,5%
Pendapatan Dana Darurat	0,0	-		-	-	#DIV/0!	
Pendapatan Lainnya	61,7	18,3	29,6%	76,7	-	0,0%	-100,0%
BELANJA	8.696,8	2.615,1	30,1%	8.655,9	2.396,7	27,7%	-8,4%
Belanja Operasi	6.247,9	2.223,8	35,6%	6.460,6	2.197,5	34,0%	-1,2%
Belanja Pegawai	2.958,9	1.198,1	40,5%	2.593,3	1.184,4	45,7%	-1,1%
Belanja Barang	1.860,3	486,2	26,1%	2.459,8	625,0	25,4%	28,5%
Belanja Bunga	7,2	-	0,0%	19,0	-	0,0%	
Belanja Subsidi	35,7	2,4	6,7%	35,9	8,5	23,6%	254,1%
Belanja Hibah	460,4	134,5	29,2%	360,9	105,7	29,3%	-21,4%
Belanja Bantuan Sosial	16,4	0,2	1,3%	10,8	2,2	20,4%	892,5%
<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	909,1	402,5	44,3%	980,8	271,8	27,7%	-32,5%
Belanja Modal	2.434,9	391,3	16,1%	2.180,1	198,4	9,1%	-49,3%
Belanja tidak terduga	14,0	-	0,0%	15,3	0,8	5,4%	#DIV/0!
Transfer Pemrov	133,9	58,0	43,3%	181,1	95,2	52,6%	64,1%
BELANJA dan TRANSFER	8.830,7	2.673,1	30,3%	8.837,0	2.491,9	28,2%	-6,8%
SURPLUS/DEFISIT	(1.271,4)	837,3	-65,9%	(623,1)	1.247,5	-200,2%	49,0%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada Triwulan II 2019, realisasi PAD mencapai Rp399,2 miliar atau 41,4% dari target. Baik secara persentase terhadap targetnya maupun secara nominal, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

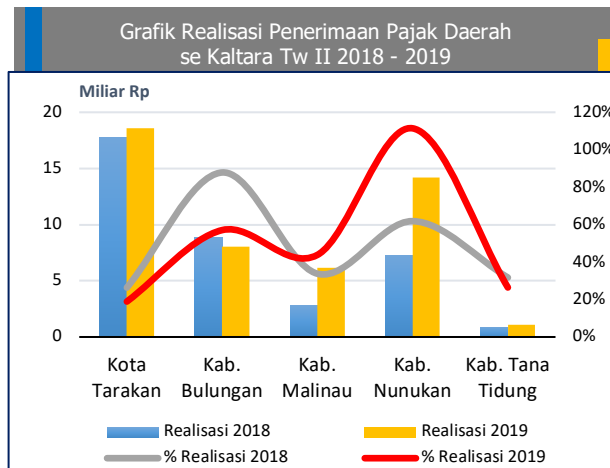
Jika dilihat lebih rinci, Komponen PAD yang mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal berasal dari Pajak

Daerah sebesar Rp228 miliar, sedangkan komponen dengan nominal realisasi terendah berasal dari Retribusi Daerah sebesar Rp11,8 miliar. Sementara komponen yang mencatatkan tingkat persentase realisasi terhadap pagu yang tertinggi yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan persentase sebesar 89,7%. Sementara Retribusi Daerah selain mencatatkan nominal yang terendah juga mencatatkan tingkat persen realisasi terhadap pagu yang terendah yaitu hanya sebesar 22,6% dari target.

Grafik diatas menunjukkan komposisi PAD mengalami perubahan kontribusi dari Triwulan II tahun 2018 ke periode saat ini. Komponen Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan kontribusi sedangkan Retribusi Daerah dan yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami sebaliknya.

Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara belum mampu merealisasikan target PAD dengan cukup optimal, hal ini ditandai dengan menurunnya rasio PAD terhadap total pendapatan (41,4 %) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 (42,2 %). Namun upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara terus mendorong optimalisasi pungutan pajak daerah. Salah satunya dengan intensifikasi pungutan pajak, seperti menagih tunggakan pajak, pendekatan pelayanan publik dengan membuat Samsat *Payment Point* dan Samsat Keliling yang telah dijalankan. Selain itu, gencarnya Pemda dalam meningkatkan iklim investasi daerah yang dinilai dapat mendorong peningkatan PAD di masa akan datang.

a) *Penerimaan Pajak Daerah*

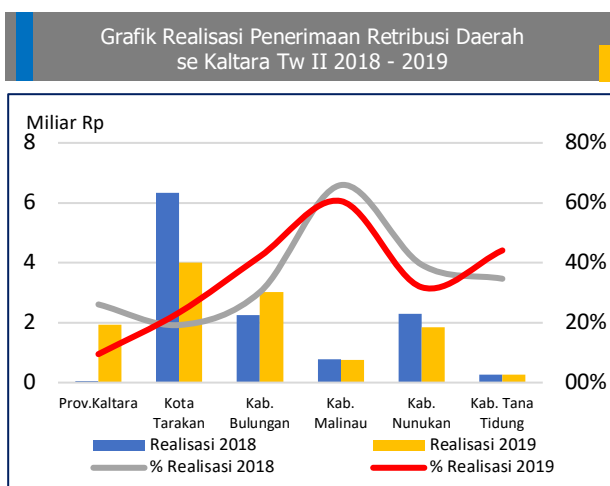


Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Total Pajak Daerah yang terhimpun sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebesar Rp228 miliar atau mencapai 45% dari target. Sebesar Rp179,91 miliar atau 79% dari total realisasi pajak daerah bersumber dari Pemprov Kalimantan Utara. Namun secara persentase realisasi terhadap target, capaian tertinggi dicatatkan Kabupaten Nunukan sebesar 111,4%. Jika sumber pajak

daerah tidak memperhitungkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Utara, maka daerah dengan penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Kota Tarakan.

b) *Penerimaan Retribusi Daerah*



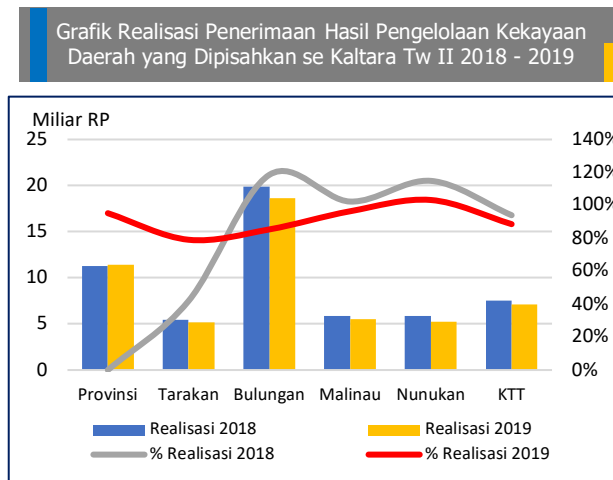
Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Sampai dengan akhir bulan Juni 2019, realisasi di seluruh Pemerintah Daerah se Kalimantan Utara mencapai Rp11,8 miliar atau sebesar 22,6% dari target. Dari enam Pemerintah Daerah, yang mencatatkan kenaikan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu tiga Pemerintah Daerah yaitu, Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan dan

Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan tiga daerah lainnya mencatatkan penurunan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu, dan yang cukup signifikan penurunannya adalah Kota Tarakan.

Untuk nominal realisasi terbesar tercatat di wilayah Kota Tarakan sebesar Rp4 miliar. Hal ini sangat wajar karena sebagian besar aktifitas perekonomian yang dikenakan retribusi daerah berlokasi di wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Tarakan.

c) *Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

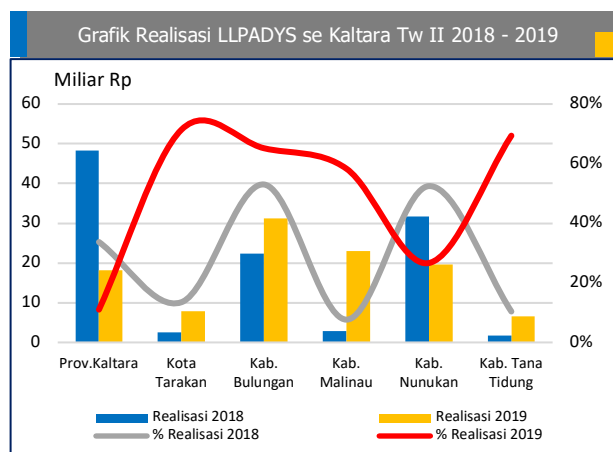


Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada akhir Triwulan II 2019 penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara agregat sudah mencapai 89,7% dari target yang ditetapkan atau setara dengan Rp53,1 miliar. Rerata capaian realisasi untuk seluruh daerah adalah 91,3%. Bahkan ada Pemda yang telah melampaui target yaitu

Kabupaten Nunukan. Daerah dengan kontribusi terbesar atas penerimaan ini adalah Kabupaten Bulungan yang tercatat sebesar Rp18,6 miliar atau 35,07% dari keseluruhan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, disusul kemudian Provinsi Kalimantan Utara yang mencatatkan realisasi sebesar Rp11,24 miliar atau 21,5 persen dari keseluruhan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kondisi ini tidak terlepas dari nilai penyertaan modal yang relatif besar di sejumlah BUMD, sehingga penerimaan dividen juga lebih besar dibanding Pemda lainnya di Kalimantan Utara.

d) *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah (LLPADYS)*



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Secara agregat, penerimaan LLPADYS regional Kalimantan Utara pada akhir periode pelaporan mencapai 30,7% dari target atau sebesar Rp106,3 miliar. Komponen PAD ini secara umum menunjukkan tren peningkatan hampir diseluruh pemda, kecuali Pemprov Kalimantan Utara dan Kabupaten

Nunukan yang tercatat mengalami penurunan realisasi.

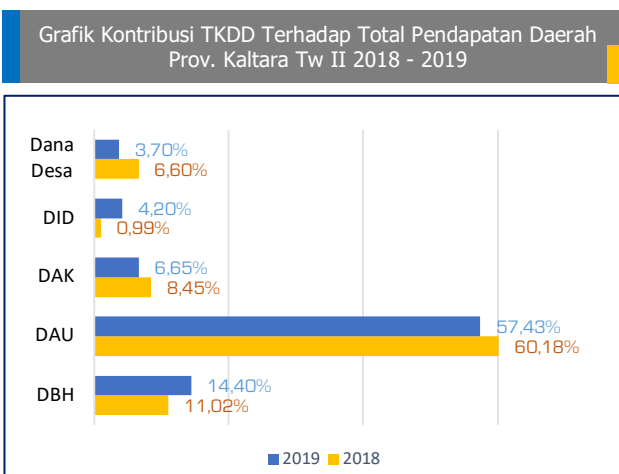
Pada triwulan II 2019 terjadi peningkatan nominal realisasi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan realisasi yang tercatat pada Pemprov

Kaltara dan Kabupaten Nunukan mengalami kondisi yang berkebalikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mayoritas sumber pendapatan Komponen LLPADYS berasal dari Pendapatan BLUD, kecuali di daerah yang belum memiliki unit yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLUD

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai 46,8 % dari alokasi atau sebesar Rp3,32 triliun. Capaian ini menunjukkan sedikit perbaikan pada nominal realisasi jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp3,13 triliun. Jika ditinjau per jenis Transfer, secara rata-rata terealisasi 48,5%, dimana jenis Transfer Pemerintah Provinsi mencatatkan tingkat realisasi tertinggi sebesar 50,2%.

Sumber Pendapatan Transfer secara nominal mayoritas berasal dari Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp3,23 triliun atau 98,1% sedangkan sisanya adalah Transfer/Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kontribusi realisasi Transfer Pemerintah Pusat terhadap total realisasi Pendapatan Daerah di regional ini menunjukkan ada peningkatan hanya di jenis transfer DBH dan DID.

Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh alokasi Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami peningkatan di tahun anggaran 2019 kecuali untuk

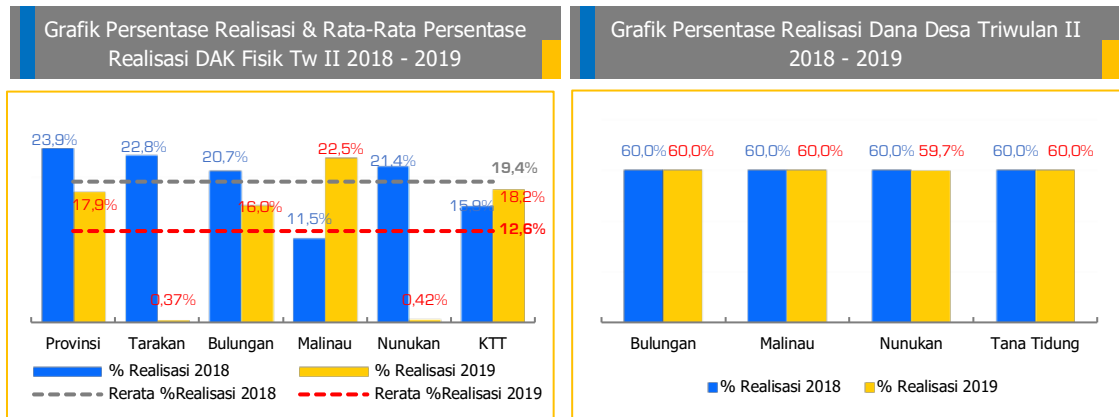
komponen Dana Desa. Namun dalam hal kontribusi realisasi masih belum optimal, karena peningkatan alokasi tidak dibarengi dengan upaya percepatan realisasi.

Berdasarkan rincian jenisnya, rata-rata realisasi DBH mencapai 38,70% sedangkan DAK mencapai 56,90% dari target. Tingkat realisasi yang tidak ideal tercatat hanya pada jenis DAK yang rata-rata baru mencapai 20,6 persen dari target.

DAK Fisik dan Dana Desa

Tingkat persentase penyaluran DAK Fisik terhadap alokasi secara agregat di Kalimantan Utara turun dari 20,70% di triwulan II tahun 2018 menjadi 12,54% di triwulan

II 2019. Rata-rata penyerapan DAK Fisik tercatat sebesar 19,4% di triwulan II tahun 2018 turun menjadi 12,6% di triwulan II 2019.



Sumber : OM SPAN (diolah)

Penurunan tingkat penyerapan DAK Fisik tersebut terjadi di seluruh Pemerintah Daerah, dimana untuk Tarakan dan Nunukan bahkan mencatatkan realisasi dibawah rata-rata. Sesuai dengan regulasi pengelolaan DAK Fisik, akhir triwulan II merupakan periode menjelang batas akhir (22 Juli) bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I sebesar 25% dari alokasi untuk nilai alokasi DAK di atas satu miliar, dan DAK Fisik dengan nilai alokasi paling banyak satu miliar sebesar total nilai kontrak kegiatan. Adanya perubahan kebijakan syarat penyaluran yang dimulai pada tahun 2019 yakni dipersyaratkannya revidi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DAK Fisik tahun/tahap sebelumnya oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdampak terhadap penurunan tingkat penyerapan DAK Fisik Tahun 2019 pada periode pelaporan jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar daerah masih menunda memulai proses seleksi penyedia barang/jasa kegiatan DAK Fisik sebelum diperoleh persepsi yang seragam atas teknis pelaksanaan revidi oleh APIP. Selain itu di Kota Tarakan yang mencatatkan persentase penyaluran terendah sebesar 0,37% dari alokasi juga dipengaruhi penyesuaian kebijakan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik oleh Kepala Daerah yang baru terpilih.

Sementara untuk penyerapan Dana Desa, terlihat di semua wilayah hingga periode Triwulan II 2018 telah mendapat penyaluran sampai dengan tahap II. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, batas akhir penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 60 persen dari alokasi paling lambat pada minggu ke-4 Juni. Jika ditinjau dari sisi persentase terhadap alokasi, hanya di Kabupaten Nunukan yang memperlihatkan

persentase realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II tidak mencapai 60%. Hal tersebut dikarenakan terdapat sisa Dana Desa tahun 2018 di RKUD Kabupaten Nunukan sehingga penyaluran tahap II ditunda sebesar sisa tersebut

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS)

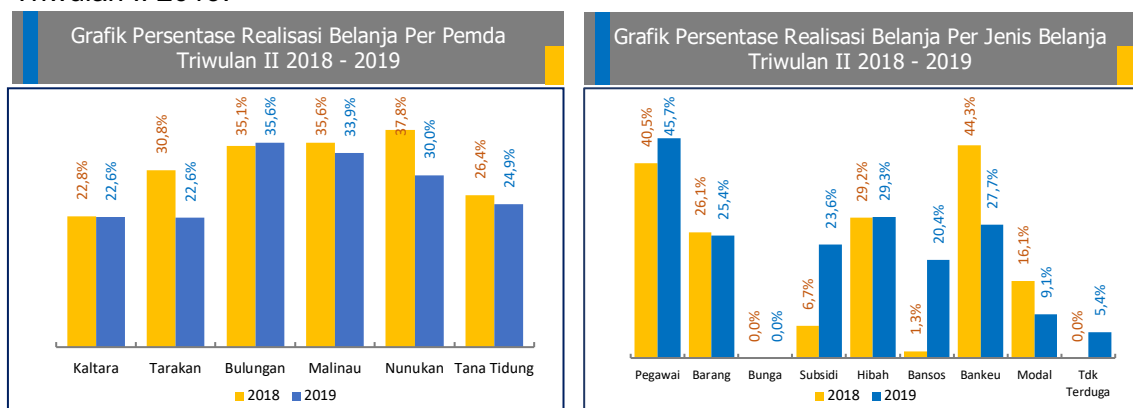
Data Pagu LLPDYS Triwulan II 2018-2019						
PEMDA	Pagu 2018	Realisasi 2018	% Realisasi 2018	Pagu 2019	Realisasi 2019	% Realisasi 2019
Prov. Kaltara	1.053.766.331	562.415.000	53,4%	43.211.636.851	512.370.000	1,2%
Kota Tarakan	30.569.680.000	-	0,0%	36.569.680.000	-	0,0%
Kab. Bulungan	1.935.000.000	1.424.546.412	73,6%	22.084.514.054	12.977.280.000	58,8%
Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-
Kab. Nunukan	30.992.100.000	16.879.058.403	54,5%	29.492.100.000	-	0,0%
Kab. TanaTidung	2.724.395.760	-	0,0%	7.293.768.783	-	0,0%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada Triwulan II 2019, tingkat realisasi tertinggi dicapai Kabupaten Bulungan sebesar Rp12,97 miliar atau 58,8% dari target. Pada posisi kedua, baik secara persentase maupun nominal tercatat di Pemrov Kaltara sebesar Rp512 juta atau 1,2% dari target. Keseluruhan daerah tercatat menetapkan pagu target penerimaan cukup signifikan dibandingkan target tahun lalu kecuali Kabupaten Nunukan yang menurunkan sedikit target penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya.

B. Belanja Daerah

Persentase realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara tercatat menurun dari 30,1% di triwulan II 2018 menjadi 27,7% di Triwulan II 2019.



Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Tingkat penyerapan tertinggi pada periode ini bersumber dari Belanja Pegawai yang mencapai 45,7% dari pagu, disusul kemudian Belanja Hibah sebesar 29,3% dan Belanja Bankeu sebesar 27,7%. Tingkat penyerapan Belanja periode Triwulan II 2019

ini dari seluruh pos Belanja mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu, kecuali untuk pos Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bankeu yang mengalami penurunan persentase penyerapan dibandingkan dengan periode Triwulan II 2018.

Mayoritas pemda selain Kabupaten Bulungan, mengalami penurunan persentase realisasi belanja dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode pelaporan, kinerja realisasi belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten Bulungan yang mencapai 35,6%. Sementara Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah dengan tingkat penyerapan belanja yang terendah sebesar 24,9%.

Realisasi Belanja secara keseluruhan yang belum optimal, sebagian besar dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Belanja Modal dikarenakan sebagian besar kegiatan masih dalam proses awal pelelangan paket pekerjaan maupun pengadaan.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun

Prognosis realisasi APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi anggaran. Pada sisi pendapatan, PAD diperkirakan mengikuti pola realisasi 2 tahun terakhir yang tercatat 90% dan 93%. Pendapatan Transfer diperkirakan tidak mengalami perubahan atau bahkan cenderung mengalami sedikit kenaikan seiring dengan kenaikan target penerimaan perpajakan dalam UU APBN 2019, maka DBH Pajak juga akan bertambah. Selain itu prediksi kenaikan harga dan permintaan komoditas batu bara yang menjadi salah satu komoditas utama diregional ini maka DBH SDA pun berpotensi mengalami peningkatan realisasi penerimaan. Di sisi belanja, capaian realisasi 78% di tahun 2017 dan 85% di tahun 2018 menjadi salah satu pertimbangan utama penyusunan prognosis realisasi sampai akhir tahun 2019 yang diperkirakan realisasi belanja akan meningkat namun tidak terlalu signifikan dari capaian tahun 2018. Melihat perkembangan realisasi sampai triwulan II 2019 masih belum optimal dan mempertimbangkan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya serta adanya beberapa program prioritas nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kalimantan Utara yang diproyeksikan akan terealisasi setelah triwulan II 2019, berikut ini prognosis sampai akhir TA. 2019

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara s.d. Triwulan IV 2019					
Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Miliar Rp	% Realisasi	Miliar Rp	% Realisasi
Pendapatan Daerah	8.213,9	3.739,3	45,5%	7.702,1	94%
Belanja Daerah	8.655,9	2.396,7	27,7%	7.241,2	90,2%
Surplus/Defisit	(442)	1.342,6	-303,7%	274,7	-25,4%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
Periode Triwulan II 2019

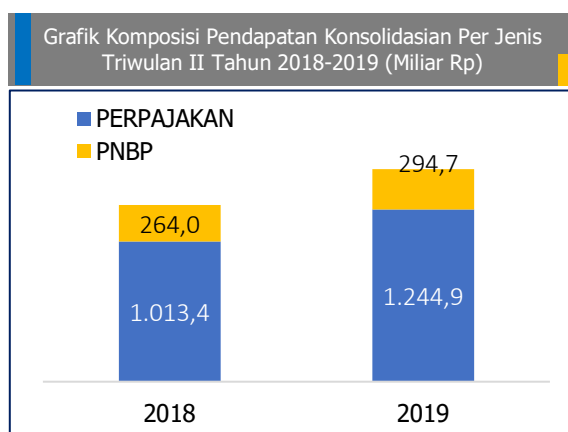
URAIAN	T.A. 2019				T.A. 2018
	Pusat (Miliar Rp)	Daerah (Miliar Rp)	Konsolidasian (Miliar Rp)	Kenaikan (%)	Konsolidasian (Miliar Rp)
PENDAPATAN NEGARA	1,111.43	3,659.70	1,539.66	20.53%	1,277.37
Penerimaan Perpajakan	1,016.95	227.97	1,244.92	22.84%	1,013.41
Penerimaan Negara Bukan Pajak	94.47	3,431.73	294.74	11.66%	263.95
BELANJA NEGARA	4,554.60	2,426.58	3,749.72	-2.40%	3,841.78
Belanja Pemerintah	1,198.08	2,154.75	3,352.83	-3.49%	3,473.98
Transfer	3,356.53	271.83	396.89	7.91%	367.81
SURPLUS (DEFISIT)	-3,443.18	1,233.12	-2,210.06	-13.82%	-2,564.41
PEMBIAYAAN	0.00	271.13	271.13	47.90%	183.32
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	291.13	291.13	43.19%	203.32
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	20.00	20.00	0.00%	20.00
SILPA/SIKPA	-3,443.18	1,213.12	-1,938.93	-18.57%	-2,381.09

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

Periode triwulan II 2019 menunjukkan realisasi Pendapatan Konsolidasian mengalami kenaikan dari Rp1.277,37 miliar pada triwulan II 2018 menjadi Rp1.539,66 miliar. Pendapatan tersebut merupakan konsolidasi dari Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp1.111,43 miliar dan Pendapatan Pemerintah Daerah konsolidasian sebesar Rp3.659,70 miliar. Realisasi Belanja Konsolidasian berbanding terbalik dengan realisasi Pendapatan konsolidasian yang mengalami penurunan dari Rp3.841,78 miliar pada triwulan II 2018 menjadi Rp3.749,72 miliar di triwulan II 2019.

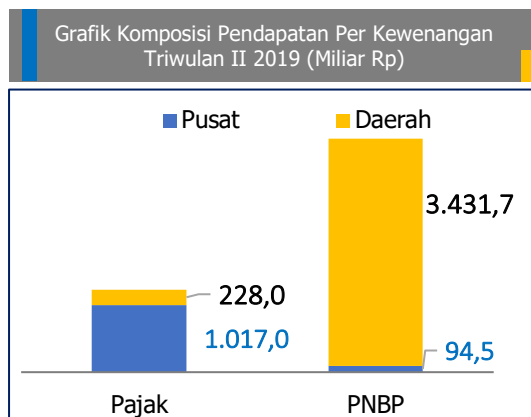
B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Komposisi Pendapatan Konsolidasian pada akhir periode pelaporan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perpajakan pada triwulan II 2019 merupakan penyumbang terbesar pendapatan senilai Rp1.244,9 miliar atau sebesar 80,86%, ini meningkat dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang menyumbang Rp1.013,4 miliar atau sebesar 79,34% dari total pendapatan konsolidasian.



Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Pada periode laporan, 81,69% Penerimaan Perpajakan Konsolidasian atau setara dengan Rp1.016,9 miliar berasal dari Pemerintah Pusat sementara 18,31% atau sebesar Rp227,9 miliar sisanya merupakan kontribusi Pemerintah Daerah. Realisasi PNBP secara akumulatif sebesar Rp3.526,2 miliar yang sebagian besar merupakan kontribusi PNBP pemerintah daerah dengan proporsi persentase sebesar 97,32% atau senilai Rp3.431,7 miliar dan sisanya sebesar 2,68% atau senilai Rp94,5 miliar merupakan kontribusi Pemerintah Pusat.

2. Analisis Perubahan

Secara agregat, pendapatan konsolidasian pada triwulan II 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan periode sebelumnya. Komponen Perpajakan mengalami kenaikan realisasi pada triwulan II 2019 sebesar 22,84% begitu pula komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 11,66%. Kondisi perekonomian di regional Kalimantan Utara yang terus bertumbuh dibanding periode sebelumnya turut mempengaruhi lonjakan realisasi pendapatan konsolidasian.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan II 2018-2019

URAIAN	TH 2018		TH 2019	
	(Miliar RP)	% ↑↓ yoy	(Miliar RP)	% ↑↓ yoy
PERPAJAKAN	1.013,41	147,8	1.244,92	22,84
PNBP	263,95	-15,4	294,74	11,66
TOTAL	1.277,37	77,2	1.539,66	20,53
PDRB ADHK	14.077	4,6	15.239	7,87

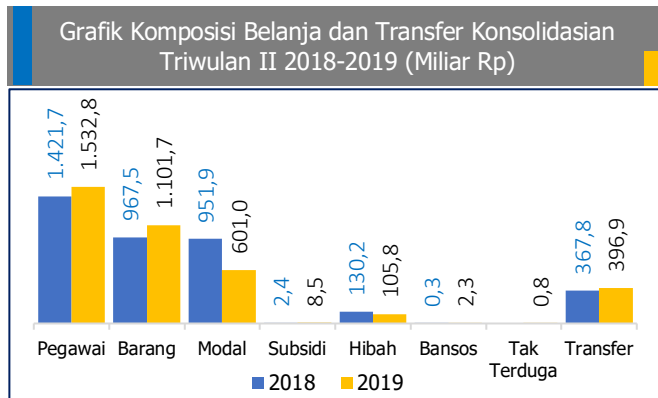
Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Pertumbuhan ekonomi di Triwulan II 2019 (yoy) yang tercatat sebesar 7,87% mengalami peningkatan pertumbuhan

dibandingkan triwulan II 2018. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada periode pelaporan tersebut ternyata berkorelasi positif atau berbanding lurus dengan realisasi pendapatan konsolidasian. Aktivitas seluruh sektor ekonomi atau lapangan usaha mengalami pertumbuhan pada periode ini. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 11,90%. Hal ini terjadi sebagai dampak Provinsi Kalimantan Utara yang secara masif dan simultan melakukan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagai provinsi baru. Meningkatnya penerimaan perpajakan tentunya berkontribusi positif terhadap realisasi pendapatan konsolidasian di regional Kalimantan Utara.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi Dan Perbandingan

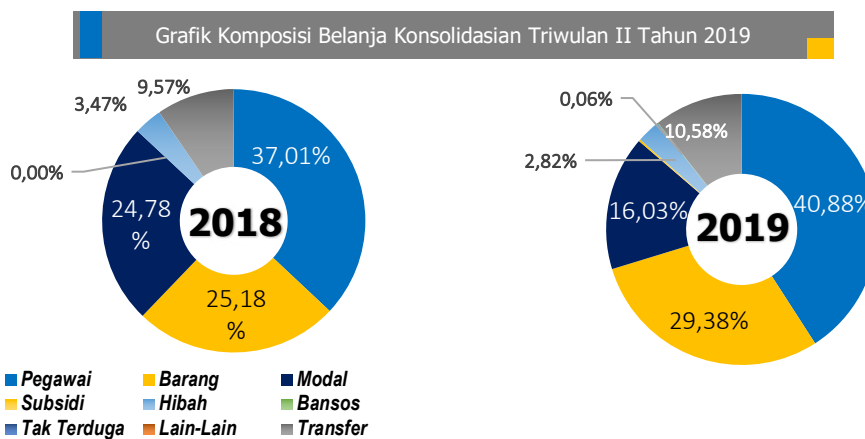


Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Sebanyak 73,39% belanja pemerintah pada triwulan II tahun 2019 digunakan untuk belanja operasional dan dana yang digunakan untuk belanja modal hanya mencapai 16,03%. Hal ini tidak berbeda jauh dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu, saat sebagian besar dana

pemerintah digunakan untuk belanja operasional mencapai 66,65%, namun rasio belanja modal cenderung menurun terhadap total belanja dan transfer konsolidasian.

2. Analisis Perubahan



Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Realisasi belanja pada triwulan II tahun 2019 didominasi oleh Belanja Pegawai yang mencapai 40,88%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan triwulan II tahun 2018 yang mencapai 37,01% serta secara nominal terjadi peningkatan sebesar Rp111,09 miliar. Peningkatan ini juga terjadi pada persentase realisasi Belanja Barang. Realisasi Belanja Barang naik dari semula 25,18% menjadi 29,38%, sementara Belanja Modal mengalami penurunan dari 24,78% menjadi 16,03%. Penurunan realisasi belanja modal karena sebagian besar proyek-proyek infrastruktur dalam proses seleksi penyedia barang dan jasa. Salah satu indikator terkait hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran DAK Fisik yang banyak terjadi di menjelang *deadline*/batas waktu penyaluran selain itu juga dapat dilihat dari

kegagalan salur DAK Fisik. Keterbatasan ruang fiskal di beberapa daerah di Kalimantan Utara, memaksa Pemda untuk melakukan efisiensi.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai dengan triwulan II 2019 secara relatif cukup memberikan pengaruh signifikan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemberian gaji 14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan penyaluran dana sosial yang tinggi menjadi pemicu sektor konsumsi pemerintah mencatatkan tingkat pertumbuhan (*yoy*) pada triwulan II 2019 sebesar 4,97% bahkan jika dibandingkan dengan triwulan I 2019 (*qtq*) pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 59,40%.

Pembangunan infrastruktur turut memberikan andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Laju pertumbuhan PMTB pada triwulan II tahun 2019 yang tercatat sebesar 5,81% (*yoy*) mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Faktor meningkatnya pertumbuhan salah satunya ialah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Komponen PMTB merupakan kontributor kedua terbesar dengan besaran 1,72% dari total pertumbuhan PDRB yang sebesar 7,87%.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Kalimantan periode triwulan II tahun 2019, Belanja pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah mencapai Rp3.400,94 miliar, sementara itu investasi pemerintah senilai Rp548,89 miliar. Adapun PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan II tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.669,11 miliar.

Dengan demikian, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB sebesar 14,37%, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Begitupun kontribusi dari investasi pemerintah tercatat sebesar 2,32% mengalami penurunan dibandingkan periode triwulan II 2018. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada investasi pemerintah.

Tabel Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB ADHB Triwulan II 2018-2019

KOMPONEN PDRB	2018		2019	
	Nominal (Miliar Rp)	% Kontribusi	Nominal (Miliar Rp)	% Kontribusi
BELANJA (G)	3.432,18	16,36%	3.400,94	14,37%
INVESTASI (I)	951,90	4,54%	548,89	2,32%
PDRB	20.739,76		23.669,11	

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH

Tarakan Membutuhkan Tempat Pelelangan Ikan

Kalimantan Utara sebagai provinsi paling muda di wilayah NKRI yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah sehingga diprediksi dapat menjadi salah satu kawasan industri besar di Indonesia. Seperti lazimnya provinsi di Pulau Kalimantan kegiatan di sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar perekonomian, begitu pula dengan Provinsi Kalimantan Utara. Selain sektor tersebut Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar di sektor perikanan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian bahkan sebagai penyumbang terbesar kedua setelah sektor penggalian dan pertambangan.

Sektor perikanan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDRB belum mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah daerah, salah satunya terjadi di Kota Tarakan. Ada beberapa kendala didalam pengelolaan perikanan, salah satunya ialah belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Tarakan. Komoditi perikanan yang masuk ke Tarakan banyak yang berasal dari nelayan daerah sekitarnya (Sulawesi) bahkan dari luar negeri (Tawau, Malaysia) dan sebagian besar masuk melalui pelabuhan tradisional Beringin. Keberadaan TPI menjadi penting, karena ikan yang datang ke Pelabuhan Beringin tidak diketahui dengan pasti dari mana asalnya, berapa jumlahnya dan akan dikirimkan kemana saja.

Pembangunan TPI di Kota Tarakan diharapkan pendataan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, baik itu terkait dengan asal dan tujuan ikan setelah tiba di Tarakan dan tidak kalah penting ialah dapat dilakukan penelusuran apabila terjadi masalah dengan ikan yang ditangkap. Selain dari sisi tersebut dari sisi perekonomian juga akan menjadi stimulus perekonomian daerah. Keberadaan TPI sebagai “pasar” ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata kuliner yang semakin populer dikalangan wisatawan sehingga dengan kegiatan ekonomi yang menggeliat akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan.

Multiflier effect yang timbul dari keberadaan TPI di Kota Tarakan akan sangat terasa dampaknya baik dibidang ekonomi maupun bidang sosial. Terciptanya lapangan kerja yang baru sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi dan dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah Kalimantan Utara.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

JALAN SUTOYO NOMOR 1, TANJUNG SELOR 77211
TELEPON (0552) 2034598, Email: kanwildjpb.kaltara@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : ND- **326** /W/PB.21/2019

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2019 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara. *Softcopy* KFR tersebut telah kami kirimkan ke alamat *email* ditpa@kemenkeu.go.id dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah,


Iman Santosa